

DPPKB Bombana Sosialisasikan Juklak GENTING untuk Percepat Penurunan Stunting

Bombana, sultranet.com - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan yang diikuti Tim Pengendali Genting (TPG) se-Kabupaten Bombana itu dipusatkan di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk memastikan program berjalan lebih terarah.

“Melalui sosialisasi Juklak ini kita dapat memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting di Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Orang tua asuh sebagai mitra juga diharapkan mampu memastikan pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” kata Abdul Azis.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan hingga kini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum tereduksi dan menjadi fokus utama penanganan.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum tereduksi. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Azis menjelaskan setiap stakeholder nantinya diberi tanggung jawab melakukan intervensi minimal pada dua keluarga risiko stunting. Bentuk

intervensi yang dimaksud bisa berupa edukasi, pembinaan, hingga penanganan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana. Dengan peran aktif semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

DPPKB Bombana bersama TPG juga berkomitmen memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Upaya tersebut, kata Abdul Azis, sejalan dengan visi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas di Bombana. “Kami yakin, bila setiap stakeholder bergerak bersama, maka masalah stunting dapat ditangani lebih cepat. Generasi Bombana yang tumbuh sehat akan menjadi modal besar untuk masa depan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Juklak GENTING ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi stunting. Melibatkan lintas sektor, program ini menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Pemkab Bombana Perkuat Sinergi Tekan Angka Stunting

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti

lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

TPG Bombana Perkuat Konsolidasi untuk Tekan Angka Stunting

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini diikuti berbagai perangkat daerah, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, PMD, RSUD hingga Inspektorat, dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/08/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang turut hadir, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting secara terukur. "Upaya ini membutuhkan sinergi kuat antarinstansi. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting berperan besar, terutama dalam pemberian nutrisi dan edukasi secara berkelanjutan.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., menyebut konsolidasi TPG sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi di lapangan. "Dengan forum ini, kita berharap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," katanya. Ia meminta seluruh stakeholder mengusulkan program yang telah ada dalam APBD untuk diintegrasikan agar intervensi stunting dapat dimaksimalkan dalam perubahan anggaran.

Ia juga memaparkan berbagai kontribusi perangkat daerah, termasuk program

Bina Keluarga Balita (BKB) serta Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan disebut memperkuat intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan dan peningkatan layanan Posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE., menyoroti pentingnya penggunaan data Posyandu sebagai dasar penetapan sasaran intervensi. "Data Posyandu lebih aktual dan berbasis lapangan sehingga mampu menggambarkan kondisi balita secara riil. Pendekatan ini strategis untuk memastikan intervensi tepat sasaran," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, TPG juga membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), termasuk penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, serta pemantauan berkala di wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai upaya mewujudkan generasi Bombana yang sehat, kuat dan berkualitas di masa depan.

Bupati Bombana Dorong Pejabat Daerah Jadi Orang Tua Asuh Cegah Stunting

BOMBANA, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.



Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati.

Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.

Bombana Salurkan Bantuan Stunting, Bupati: Ini Investasi Jangka Panjang SDM

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui program sosial terpadu yang menysasar balita dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan program prioritas nasional untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Selasa, 1 Juli 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyerahkan langsung Bantuan Sosial Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sasaran di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi paket makanan tambahan bergizi, perlengkapan kesehatan anak, serta kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan bagi balita dan ibu hamil yang teridentifikasi dalam kategori rentan stunting. Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program orang tua asuh "Bapak Bunda Asuh Anak Stunting", yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab langsung di lapangan.

"Penanganan stunting ini bukan kegiatan insidental, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan," ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh tidak dapat

dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan.

“Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global di masa mendatang. Itu sebabnya kita semua harus ambil bagian. Tidak cukup hanya mengandalkan program dari atas, tetapi kita juga harus aktif di tingkat keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembagian bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan edukasi bagi para ibu. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan mengikuti program pembinaan keluarga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang anak. Jangan ragu ke Posyandu, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi peran ibu sangat menentukan,” ucap Fatmawati.

Program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting” sendiri merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan moral sosial masyarakat, yang diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan di Bombana.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dijalankan Pemkab Bombana agar dapat mendukung pencapaian target nasional menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 dan menjaga kestabilannya menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan, untuk ikut serta dalam berbagai program penguatan keluarga dan gizi anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bombana berharap ke depan tidak ada lagi anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi atau minimnya layanan kesehatan dasar.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi anak-anak Bombana yang tumbuh dalam kekurangan. Kita harus wujudkan masa depan yang sehat dan bermartabat untuk mereka,” tutup Burhanuddin.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, khususnya para penerima manfaat yang mengaku terbantu dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

Hj. Fatmawati Burhanuddin Komitmen Jadikan TP-PKK Garda Terdepan Pemberdayaan Keluarga di Bombana

Bombana, sultranet.com - Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin, S.Sos, resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bombana serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sultra, Ny. Arinta Nila Hapsari, bersama 16 kabupaten/kota lainnya di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutannya, Ny. Arinta Nila Hapsari menegaskan pentingnya peran TP-PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat. Ia berharap para ketua yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif di daerah masing-masing.

“Saya yakin, para Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu di Sulawesi Tenggara mampu menjadi penggerak perubahan. Sinergi dan komitmen yang kuat akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Hj. Fatmawati Burhanuddin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berkomitmen menjadikan TP-PKK Bombana sebagai motor utama dalam pemberdayaan

keluarga, perempuan, dan anak.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus saya emban dengan sepenuh hati. Bersama seluruh kader, kita akan bergerak maju untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat yang lebih sehat,” katanya.



Hj. Fatmawati bukan sosok baru dalam pemberdayaan keluarga di Bombana. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana dari 2022 hingga akhir 2023. Selama kepemimpinannya, ia menggagas berbagai program inovatif yang berdampak langsung pada masyarakat.

Salah satu program unggulannya adalah GEROBAK DAHSAT (Gerakan Olah Dapur Sehat Atasi Stunting), yang menghadirkan kuliner sehat berbahan lokal untuk menekan angka stunting di Bombana. Program ini mendapat apresiasi luas karena memberikan edukasi gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, ia juga mencetuskan program “1 Desa 1 Produk,” yang mendorong setiap desa memiliki produk unggulan berbasis kearifan lokal. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga dan memberdayakan UMKM lokal agar lebih berkembang.

Hj. Fatmawati menegaskan bahwa program-program tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan selama masa kepemimpinannya.

“Inovasi tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengembangkan program yang telah berjalan dan menghadirkan ide-ide baru yang lebih kreatif untuk mendukung pemberdayaan keluarga serta penguatan posyandu,” tuturnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran PKK dan Posyandu di Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan program inovatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Acara pelantikan berlangsung khidmat bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, jajaran pemerintah daerah, perwakilan organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya.

Dengan dilantikannya Hj. Fatmawati Kasim Marewa Burhanuddin sebagai Ketua TP-PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, diharapkan akan lahir berbagai inisiatif baru yang mampu memperkuat pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

IWAPI Sultra Bagikan Makanan Bergizi untuk Anak Pesantren di HUT ke-50

Kendari, sultranet.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Acara berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, S.M., M.M., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IWAPI Sultra berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI menargetkan pembagian 50.000 paket makanan bergizi di seluruh Indonesia, sejalan dengan usia organisasi yang kini menginjak 50 tahun. Namun, realisasi distribusi melampaui target dengan lebih dari 60.300 titik pembagian di 36 provinsi.

Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan program kesehatan nasional. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” kata Almin.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, H. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., yang diwakili oleh pengurus pondok pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh IWAPI Sultra.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini telah memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran serta buah-buahan. Hal ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mereka.

IWAPI Sultra berharap program ini dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara.

Andi Asniwati Mustari Kunjungi Desa Bajo Bahari Buton, Beri Makanan Tambahan Anak

Buton, SultraNET. | Ibu Pj. Bupati Buton sebagai penasehat DWP Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari bersama Ketua DWP Kabupaten Buton, Ny Kiki Asnawi melakukan kunjungan Lapangan Di Desa Bajo Bahari dalam rangka pemberian makanan tambahan anak di Lokasi Stunting yang dipusatkan di Kantor Desa Bajo Bahari, Kecamatan Wabula, Senin 25 September 2023.

Kunjungan lapangan itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton sebagai Pembina DWP Kabupaten Buton, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton, Camat Wabula bersama Ketua DWP Kecamatan Wabula, Kepala Desa Bajo Bahari.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd,.M.Si dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada ibu Pj. Bupati Buton sebagai Penasehat DWP Kabupaten Buton Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari atas kehadirannya yang merupakan kunjungan perdananya di Desa Bajo Bahari.



Warga Desa Bajo Bahari saat menghadiri kegiatan

Sekda berharap dengan jalannya kegiatan ini dapat berdampak pada pencapaian target pemerintah tentang penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 serta dapat terwujudnya Kabupaten Buton bebas stunting.

“Dengan mewujudkan Kabupaten Buton Bebas Stunting olehnya itu harus adanya kerja sama mulai dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa,” .

Pemerintah Kabupaten Buton lanjut Sekda sangat serius dalam upaya penurunan angka stunting dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Buton nomor 359 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Buton nomor 117 tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton.

“Pemerintah Kabupaten Buton menunjukkan keseriusan dalam penanganan stunting, salah satunya melalui Surat Keputusan Bupati Buton, nomor 359 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Bupati Buton nomor 117 tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton, yang di dalamnya telah termaktub dan melibatkan multi perangkat daerah,” katanya..

Di akhir sambutannya Sekda Buton berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam upaya penanganan stunting di

Kabupaten Buton sehingga di masa depan daerah ini dapat memiliki generasi yang sehat dan cerdas.

“Saya harap acara penyuluhan stunting yang kita laksanakan pada hari ini, dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Buton, dan membantu menciptakan generasi yang sehat dan cerdas,” tutupnya.

Selain pemberian makanan tambahan kepada anak, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan posyandu di Kantor Desa Bajo Bahari.

Sementara itu, Ibu Pj. Bupati Buton sebagai penasehat DWP Kabupaten Buton Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari menyampaikan pemberian makanan tambahan ini merupakan bentuk upaya dalam percepatan penurunan stunting pemerintah memberikan bantuan kepada anak yang terindikasi stunting.

Pemberian makanan tambahan (PMT) adalah kegiatan pemberian makanan untuk bayi dan balita guna melengkapi kebutuhan gizi anak agar mencapai berat badan sesuai usianya.



Andi Asniwati Mustari menyerahkan paket makanan tambahan Anak

“Untuk mencegah stunting dimulai dari sanitasi yaitu menjaga kebersihan jamban, air bersih dan membiasakan mencuci tangan sebelum makan dan juga pola asu anak dengan pemberian asi sebagai pendamping makanan Serta pemberian pola makan karbohidrat, protein, buah dan sayuran,” katanya.

Ia menyampaikan kepada para ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak agar mengonsumsi protein hewani berupa ikan setelah anak berusia 2 tahun sudah bisa melengkapi kebutuhan gizi untuk kualitas kembang tumbuh anak kedepannya.

“Apalagi kita yang hidup di pesisir laut kaya akan beragama macam ikan segar, saya menyampaikan kepada ibu ibu untuk mencukupi kebutuhan anak dengan mengonsumsi ikan agar anak anak kita di Buton semua cerdas”, ungkapnya.

Ia berharap agar kita dapat bersama-sama dalam penanganan pencegahan stunting ini untuk tumbuh kembang anak kita agar anak kita tumbuh menjadi putra-putri Buton yang sehat dan cerdas.

Sumber : (KominfoButon/Widia Ningsih)